



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026

BTP Kelas I Semarang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kinerja Tahunan BTP Kelas I Semarang tahun 2026 disusun sebagai tahun pertama dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029 bidang Perkeretaapian, dimana telah diberlakukannya restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan di seluruh Kementerian, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing.

Secara umum Rencana Kinerja Tahunan BTP Kelas I Semarang tahun 2026 memuat kebijakan di lingkungan BTP Kelas I Semarang dan secara khusus membahas kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan penganggaran berbasis kinerja, baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan transportasi perkeretaapian. Rencana Kinerja Tahunan BTP Kelas I Semarang tahun 2026 disamping dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh jajaran di BTP Kelas I Semarang untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, secara substansi juga sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2025-2029. Semoga Rencana Kinerja Tahunan BTP Kelas I Semarang tahun 2026 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah dalam pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang.

SEMARANG, JANUARI 2026
KEPALA BALAI TEKNIK
PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG



RUDI PITOYO, S.E.

Penata Tk. I (IV/a)

NIP. 19800708 200212 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	1
I. 1 DASAR HUKUM.....	1
I. 2 LATAR BELAKANG	2
I. 3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
I. 4 ORGANISASI SERTA TUGAS DAN FUNGSI BTP KELAS I SEMARANG	4
BAB II RENCANA STRATEGIS	27
II. 1 TUJUAN PEMBANGUNAN	27
II. 2 SASARAN PEMBANGUNAN	28
II. 3 SASARAN BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	29
II. 4 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	31
II. 5 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BTP SEMARANG	33
II. 6 KONDISI PERKERETAAPIAN YANG DIHARAPKAN TAHUN 2025-2029	35
II. 7 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN.....	36
BAB III KONDISI/ CAPAIAN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN	37
III. 1 OUTCOME PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN 2025-2029	37
III. 2 PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN 2025-2029	44
BAB IV RENCANA KINERJA TAHUNAN	26
IV. 1 SASARAN PROGRAM, INDIKATOR KINERJA DAN POK 2026	26
IV. 2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	31
BAB V PENUTUP	33



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Tabel I. 2 Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan	5
Tabel II. 1 Indikator Kinerja Program (IKP)	28
Tabel II. 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan 2025-2029.....	31
Tabel II. 3 Sasaran dan Indikator Kegiatan	33
Tabel III. 1 Capaian Kinerja Agenda Pembangunan ke-5	45
Tabel IV.1 Sasaran Program,Indikator Kerja, POK Awal Tahun 2026	27



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	4
Gambar I. 2 Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan.....	5
Gambar I. 3 Struktur Organisasi BTP Kelas I Semarang	5
Gambar III. 1 Rasio Konektivitas 2025 - 2029	37
Gambar III. 2 TQI Kategori I dan II	38
Gambar III. 3 Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal.....	39
Gambar III. 4 Pemenuhan Target Angkutan KA	40
Gambar III. 5 Realisasi Perjalanan KA Perintis.....	41
Gambar III. 6 Penurunan Kejadian Gangguan Operasional.....	42
Gambar III. 7 Tingkat Keselamatan Perjalanan KA	43



BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Kementerian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Permenhub Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Permenpan-RB Nomor PM 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Permenhub Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024;
15. Permenhub Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
16. Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Permenhub Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian.



I. 2 LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 bidang Perkeretaapian, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang tahun 2026 yang merumuskan prioritas-prioritas kegiatan tahun 2026 serta sasaran kegiatan yang akan dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda pembangunan bidang perkeretaapian yang perlu diselesaikan pada tahun 2026.

Rencana kinerja tahunan BTP Kelas I Semarang tahun 2026 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang yang merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara umum Rencana Kinerja Tahunan BTP Kelas I Semarang tahun 2026 memuat kebijakan BTP Kelas I Semarang serta kegiatan pendukungnya. Berdasarkan arah kebijakan, selanjutnya disusun program-program pembangunan yang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan. Adapun uraian Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2026 serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2026. Rencana Kinerja Tahunan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang di bidang pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian pada tahun 2026 dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegritas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

I. 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Berpedoman pada konsep Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029 bidang perkeretaapian, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang tahun 2026 yang merumuskan prioritas-prioritas kegiatan tahun 2026 serta sasaran kegiatan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda pembangunan bidang perkeretaapian yang perlu diselesaikan pada tahun 2026. Rencana Kinerja Tahunan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang tahun 2026 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang yang merupakan bagian dari penyusunan APBN.



Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang tahun 2026 memuat kebijakan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang serta kegiatan pendukungnya. Berdasarkan arah kebijakan, selanjutnya disusun program - program pembangunan yang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan. Adapun uraian Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2025 serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2026. Rencana Kinerja Tahunan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang di bidang pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian pada tahun 2026 dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegritas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia



I. 4 ORGANISASI SERTA TUGAS DAN FUNGSI BTP KELAS I SEMARANG

A. ORGANISASI

Dalam organisasi dan tata kerja Balai Teknik Perkeretaapian Semarang, didukung dengan SDM dan Pejabat Struktural yang kompeten dengan rincian sebagai berikut:

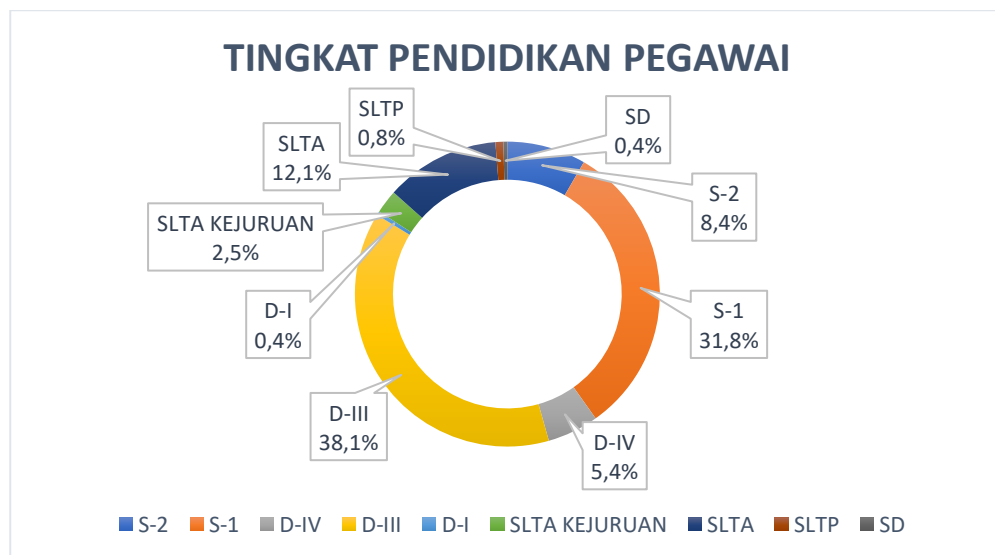
1. Sumber Daya Manusia

Komposisi sumber daya manusia (SDM) pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang TA 2026 sejumlah 153 orang pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 87 berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel I. 1 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KOMPOSIS I
1	Pasca Sarjana (S2)	20	8,4%
2	Sarjana (S1)	76	31,8%
3	Diploma IV/ Sarjana Terapan	13	5,4%
4	Diploma III	91	38,1%
5	Diploma I	1	0,4%
6	SLTA	6	2,5%
7	SLTA Kejuruan	29	12,1%
8	SLTP	2	0,8%
9	SD	1	0,4%
Jumlah		239	100%



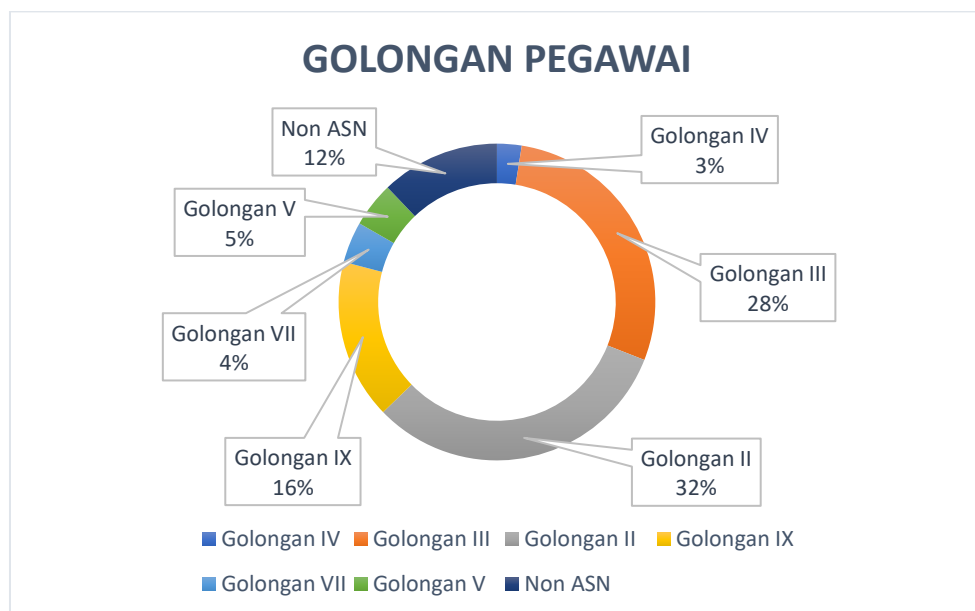
Gambar I. 1 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



b. Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel I. 2 Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KOMPOSISI
1	Golongan IV	6	3%
2	Golongan III	68	28%
3	Golongan II	76	32%
4	Golongan IX	39	16%
5	Golongan VII	10	4%
6	PPNPN	11	5%
Jumlah		239	100%



Gambar I. 2 Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan



2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian.



Gambar I. 3 Struktur Organisasi BTP Kelas I Semarang



B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian, sesuai tugas pokoknya Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang mempunyai tugas melaksanakan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan prasarana perkeretaapian dan pengawasan penyelenggaraan sarana, dan keselamatan perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang menyelenggarakan fungsi dan kewenangan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut kedudukan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang merupakan unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan sebagai salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. pelaksanaan kegiatan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana perkeretaapian;
3. pelaksanaan pengawasan kegiatan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian;
4. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perlintasan sebidang sementara, perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
5. pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan;
6. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian;
7. pelaksanaan pengawasan keselamatan perkeretaapian;



8. pelaksanaan sosialisasi dan tindakan korektif pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian; dan
9. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang mempunyai susunan organisasi sebagaimana berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi di Sub Bagian Tata Usaha:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan dan kesekretariatan di lingkungan BTP Kelas I Semarang;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan BTP Kelas I Semarang;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan BTP Kelas I Semarang;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan kehumasan di lingkungan BTP Kelas I Semarang;
- e. Mengkoordinasikan kondisi sumber daya manusia Balai teknik perkeretaapian Kelas I Semarang.

2. Seksi Prasarana Perkeretaapian

Tugas pokok dan fungsi pengawasan dan peningkatan di bidang Prasarana Perkeretaapian meliputi:

- a. Mengkoordinasikan bahan pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian;
- b. Mengkoordinasikan bahan pelaksanaan pemeriksaan kelaikan prasarana perkeretaapian;
- c. Mengkoordinasikan bahan pengawasan prasarana perkeretaapian;
- d. Mengkoordinasikan bahan pengelolaan logistik material dan peralatan kerja;
- e. Mengkoordinasikan bahan pengawasan pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian;



- f. Mengkoordinasikan bahan rehabilitasi dan perbaikan prasarana perkeretaapian;
- g. Mengkoordinasikan bahan pengawasan pelaksanaan IMO dan TAC;
- h. Mengkoordinasikan bahan pengawasan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian;
- i. Mengkoordinasikan bahan pengawasan pemanfaatan aset prasarana perkeretaapian.

3. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan KA

Tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan KA meliputi:

- a. Menyelia penyusunan bahan pengawasan penataan jaringan jalur kereta api;
- b. Menyelia penyusunan bahan pengawasan jaringan jalur KA yang beroperasi dan tidak beroperasi;
- c. Menyelia penyusunan bahan pengawasan pengoperasian sarana;
- d. Menyelia penyusunan bahan pengawasan pengembangan usaha;
- e. Menyelia penyusunan bahan pengawasan PSO dan angkutan perintis;
- f. Menyelia penyusunan bahan kegiatan analisis dan penelaahan permasalahan-permasalahan hukum serta dasar legalitas kebijakan pembangunan perkeretaapian

4. Seksi Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian

Tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian meliputi:

- a. Menyelia penyusunan bahan pengawasan kelaikan sarana;
- b. Menyelia penyusunan bahan pengawasan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian;
- c. Menyelia penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan analisis dan penanganan kecelakaan;
- d. Menyelia penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan kegiatan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- e. Menyelia penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan identifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam;



- f. Menyelia penyusunan bahan pengawasan keselamatan di perlintasan sebidang.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

II. 1 TUJUAN PEMBANGUNAN

A. Tujuan Kementerian Perhubungan

Berikut merupakan tujuan Kementerian Perhubungan, antara lain:

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

B. Sasaran Kementerian Perhubungan

- SS 1. Terwujudnya Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional;
- SS 2. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- SS 3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- SS 4. Meningkatnya Level Keselamatan dan Keamanan Perhubungan;
- SS 5. Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran;
- SS 6. Meningkatnya Kualitas Rumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Regulasi;
- SS 7. Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan;
- SS 8. Meningkatnya SDM yang Kompeten dan Berintegritas;
- SS 9. Meningkatnya Kerja Sama Bidang Transportasi, Pengelolaan Regulasi dan Layanan Hukum, Sarana, Prasarana dan Teknologi Informasi;
- SS 10. Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Bidang Perhubungan.



II. 2 SASARAN PEMBANGUNAN

A. Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Rumusan mengenai tujuan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam menyelenggarakan perkeretaapian nasional pada periode 2025-2029 menetapkan tujuan yang terdiri dari 3 butir sebagai berikut:

1. Meningkatkan Konektivitas dan Keterpaduan Moda Transportasi dengan Jaringan Kereta Api;
2. Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Kereta Api;
3. Meningkatkan Kinerja Pelayanan dengan SDM yang Kompeten untuk Meningkatkan Produktivitas di bidang perkeretaapian.

B. Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan diukur dengan indikator kinerja secara lebih rinci sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 1 Indikator Kinerja Program (IKP)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
1	SP1. Meningkatkan Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP 1. Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian
2	SP2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perkeretaapian
		IKP 3. Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api
		IKP 4. Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api
3	SP3. Meningkatkan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK5. Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1000 Jumlah Keberangkatan KA



4	SP4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6. Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
---	--	--

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan merupakan implementasi dari fungsi-fungsi tersebut diterjemahkan ke dalam activity process (proses kegiatan) di lingkungan DJKA.

II. 3 SASARAN BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG

Komprehensivitas pertimbangan dalam penetapan visi dan misi Presiden terpilih dan tujuan serta penjabaran sasaran Kementerian Perhubungan sangat diperlukan agar sasaran penyelenggaraan perkeretaapian dalam 5 tahun kedepan tidak terlepas dari konteks regulasi, tantangan dan permasalahan sectoral, nasional, maupun global yang akan dihadapi. Dengan mengacu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2025-2029, maka sasaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang memiliki sasaran yaitu sebagai berikut:

1. Sasaran Pelayanan

Terwujudnya pelayanan transportasi kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

- Terlaksananya jumlah penumpang KA terangkut di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
- Terlaksananya jumlah barang KA terangkut di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.

2. Sasaran Keselamatan dan Keamanan

Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.

- Terlaksananya pemantauan dan pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api.
- Terlaksananya pencegahan dan penindakan pelanggaran perundang-undangan bidang perkeretaapian



- c. Terlaksananya analisis dan penanganan kecelakaan bidang perkeretaapian
- d. Terlaksananya pengamanan/penanganan perlintasan sebidang.

3. Sasaran Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Perkeretaapian

Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang

- a. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan kereta api
- b. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian
- c. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan kelaikan sarana perkeretaapian
- d. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian
- e. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan kelaikan prasarana perkeretaapian

4. Sasaran Kapasitas Transportasi Kereta Api

Meningkatnya kapasitas prasarana transportasi kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.

- a. Terlaksananya kegiatan pembangunan jalur kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
- b. Terlaksananya kegiatan reaktivasi jalur kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
- c. Terlaksananya kegiatan pembangunan jalur ganda pada lintas eksisting di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
- d. Terlaksananya kegiatan peningkatan jalur kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
- e. Terlaksananya kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan/terowongan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang



- f. Terlaksananya kegiatan pembangunan dan peningkatan persinyalan/telekomunikasi di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
- g. Terlaksananya kegiatan pengadaan wesel di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
- h. Terlaksananya kegiatan pengadaan bantalan di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
- i. Terlaksananya kegiatan pembangunan stasiun di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
- j. Terlaksananya kegiatan penyediaan lahan (pengadaan dan penertiban lahan) di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
- k. Terlaksananya kegiatan jumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang

II. 4 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Balai Teknik Perkeretaapian sesuai dengan PM 36 Tahun 2022 mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan prasarana perkeretaapian dan pengawasan penyelenggaraan sarana dan keselamatan perkeretaapian merumuskan sejumlah arah kebijakan dan strategi pencapaian yang harus terlaksana dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Berikut merupakan tabel penjabaran tujuan dan sasaran Balai Teknik Perkeretaapian ke dalam arah kebijakan dan strategi pencapaian.

Tabel II. 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
DJKA	BTP KELAS I SEMARANG	BTP KELAS I SEMARANG
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	SKT1. Meningkatnya Konektivitas Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK T1. Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian
SP2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	SKT2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta	IKK T2. Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah BTP



SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
DJKA	BTP KELAS I SEMARANG	BTP KELAS I SEMARANG
	Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK T3. Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik
	SKT3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK BTP4. Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian
		IKK BTP5. Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian
		IKK T6. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan KA pada Perlintasan Sebidang
SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	SKT4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK T7. Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	SKBTP6 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian	IKKT8. Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian
		IKK T9. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP
		IKK T10. Nilai Kinerja Anggaran BTP
		IKK T11. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Wilayah BTP
		IKK T12. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BTP



II. 5 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BTP SEMARANG

Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang 2026 secara ringkas seperti dalam Tabel II.3 berikut:

Tabel II. 3 Sasaran dan Indikator Kegiatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KEGIATAN	
SKT1. Meningkatnya Konektivitas Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	IKK T1. Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	1	Infrastruktur Perkeretaapian
		2	Monitoring Pelaksanaan GAPEKA
SKT2. Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian api di Wilayah BTP	IKK T2. Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah BTP (%)	1	Penggantian Bangunan Jembatan BH 1109 Km.303+680 dan BH 1164 Km.314+769 Lintas Cirebon - Kroya
		2	Penggantian Jembatan Pada BH 46 Km 21+918 dan BH 59 Km 27+920 Antara Brumbung - Gubug
		3	Pemantauan dan Evaluasi Prasarana Perkeretaapian
	IKK T3. Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik (%)	1	Pembangunan Gardu Listrik Delanggu
SK T3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah BTP	IKK T4. Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah BTP (%)	1	Pemantauan dan Evaluasi Posko Angkutan Kereta Api
		2	Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Kewajiban Pelayanan Publik
		3	Koordinasi Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA
	IKK T5. Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah BTP (%)	1	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Purwosari - Wonogiri
	IKK T6. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan KA pada Perlintasan Sebidang	1	Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KEGIATAN	
SK T4.1. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah BTP	IKK T7. Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah BTP	1	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)
		2	Pengoperasian dan Perawatan/rehabilitasi jalur, jembatan, stasiun dan fasilitas operasi kereta api
		3	Penanganan Rintang Jalan Pada Jalur KA Antara Mluwang - Cipari, Kawunganten - Lebeng, dan Sikampung Kroya Segmen Banjar - Kroya Lintas Bogor - Yogyakarta
		4	Pemantauan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian
SK T5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan BTP	IKK T8. Nilai AKIP BTP	1	Layanan Hukum
		2	Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
	IKK T9. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP	1	Penyusunan SPIP dan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
	IKK T10. Nilai Kinerja Anggaran BTP	1	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi
		2	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
		3	Layanan Perkantoran
		4	Layanan Sarana Internal
		5	Layanan Prasarana Internal
		6	Pengelolaan Keuangan
		7	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
	IKK T11. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Wilayah BTP	1	Penyusunan Laporan Keuangan



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KEGIATAN	
	IKK T12. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BTP	1	Layanan Reformasi Kinerja

II. 6 KONDISI PERKERETAAPIAN YANG DIHARAPKAN TAHUN 2025-2029

Berbagai permasalahan dan isu strategis dalam bidang perkeretaapian yang harus diselesaikan dalam periode 5 tahun ke depan (2025-2029) sehingga tercapai kondisi perkeretaapian yang diharapkan pada tahun 2025 terdiri dari 10 komponen sebagai berikut:

1. Terwujudnya reformasi regulasi melalui penguatan dan perlengkapan struktur regulasi dalam melaksanakan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam mendukung perwujudan sistem multi operator dan peningkatan layanan perkeretaapian;
2. Terwujudnya transformasi kelembagaan internal di DJKA, transformasi perusahaan sarana dan prasarana menjadi multi operator dan perluasan peran seluruh stakeholders dalam penyelenggaraan perkeretaapian;
3. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan aset jaringan prasarana eksisting dalam menyediakan layanan yang lebih luas dan berkapasitas agar investasi dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat;
4. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM perkeretaapian dalam mengantisipasi perkembangan jaringan dan tuntutan kinerja pelayanan yang lebih prima;
5. Meningkatnya peran moda kereta api dalam transportasi nasional sesuai keunggulan komparatifnya untuk mendukung pengurangan biaya logistic nasional dan penurunan tingkat kemacetan di wilayah perkotaan;
6. Terwujudnya pengembangan jaringan kereta api perkotaan di sejumlah kota besar/metropolitan sebagai upaya penyediaan sistem layanan yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
7. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan investasi di bidang perkeretaapian melalui berbagai skema pendanaan yang memungkinkan baik yang berasal dari APBN/APBD maupun BUMN dan swasta;



8. Terwujudnya pembaruan teknologi perkeretaapian serta aplikasi TIK dalam peningkatan 16 keselamatan dan pelayanan moda kereta api.

II. 7 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Sejak diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2007 sampai dengan saat ini tercatat sudah sebanyak 2 Peraturan Pemerintah (PP) dan 73 Peraturan Menteri (PM) yang diterbitkan sebagai pelaksanaannya. Sebagian besar regulasi yang ditetapkan mengatur tentang teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan/pengadaan, dan pengoperasian serta perizinan di bidang perkeretaapian.

Jika dikaitkan dengan mandat/maksud ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2007, masih terdapat kelemahan dalam struktur maupun relevansi dari regulasi-regulasi baru terutama sebagai landasan dalam pelaksanaan multi operator pada jaringan jalur eksisting, fasilitasi terhadap peran Pemda dan swasta, peningkatan jumlah SDM, serta aplikasi teknologi perkeretaapian terbaru (misalnya: monorel, MRT, HST, dsb).

Proses reformasi regulasi dengan memperkuat struktur dan melengkapi kebutuhan regulasi di bidang perkeretaapian akan tetap menjadi isu penting dalam 5 tahun ke depan, khususnya dalam memfasilitasi pembagian peran antara Pusat, BUMN, Pemda, dan Swasta (termasuk lembaga terkait lainnya) dalam mendorong investasi dan penciptaan multi operator yang sehat.

Berbagai tantangan dalam penyelenggaraan perkeretaapian di masa datang, baik dalam rangka peningkatan konektivitas, kapasitas dan kinerja layanan, maupun keselamatan mengharuskan adanya suatu kerangka kelembagaan yang kuat dalam penyelenggaraan perkeretaapian nasional. Kerangka kelembagaan ini setidaknya mencakup kelembagaan internal di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan juga kelembagaan secara luas dalam hubungan antara operator-regulator-user- public.



BAB III

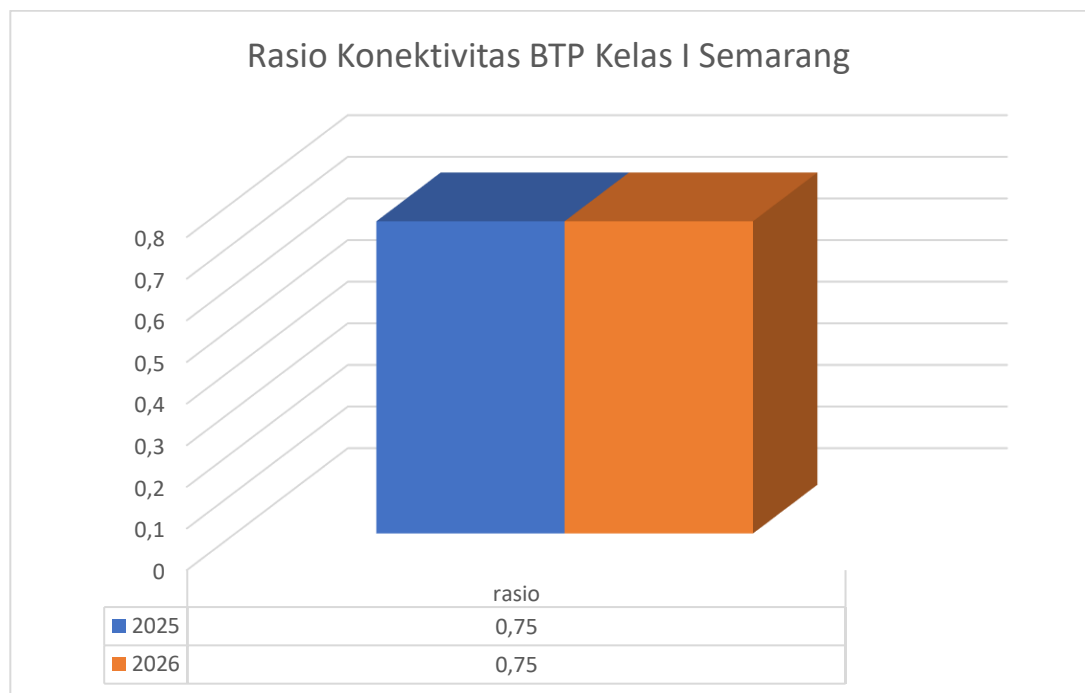
KONDISI/ CAPAIAN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN

III. 1 *OUTCOME* PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN 2025-2029

Pencapaian dari masing-masing indikator kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang mulai tahun 2025 sampai 2029 sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas

Berikut merupakan Target Rasio Konektivitas BTP Kelas I Semarang 2025-2029:



Gambar III. 1 Rasio Konektivitas 2025 - 2029

Target Rasio Konektivitas pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang pada Tahun 2026 masih sama dengan target 2025 yaitu 0,750 dengan kegiatan pendukung antara lain:

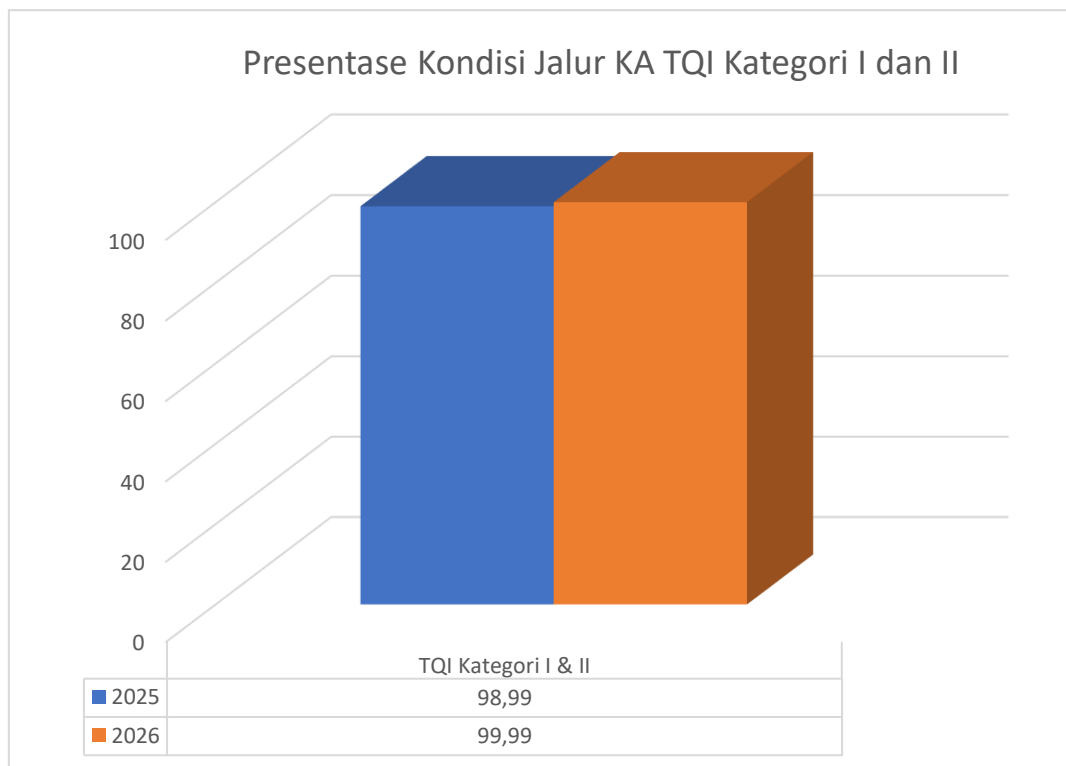
- Sesuai dengan PM 36 Tahun 2022 bahwasanya untuk wilayah kerja BTP Kelas I Semarang hanya mencakup Jawa Tengah dan DIY sehingga untuk target Rasio Konektivitas di Wilayah Kalimantan dihilangkan;



- b. Untuk periode 2025 – 2029 tidak ada rencana untuk melaksanakan reaktivasi pembangunan jalur baru.

2. Kondisi Jalur KA TQI Kategori I dan II (persentase)

Berikut merupakan Target Presentase Kondisi Jalur KA TQI Kategori I dan II BTP Kelas I Semarang Tahun 2026:



Gambar III. 2 TQI Kategori I dan II

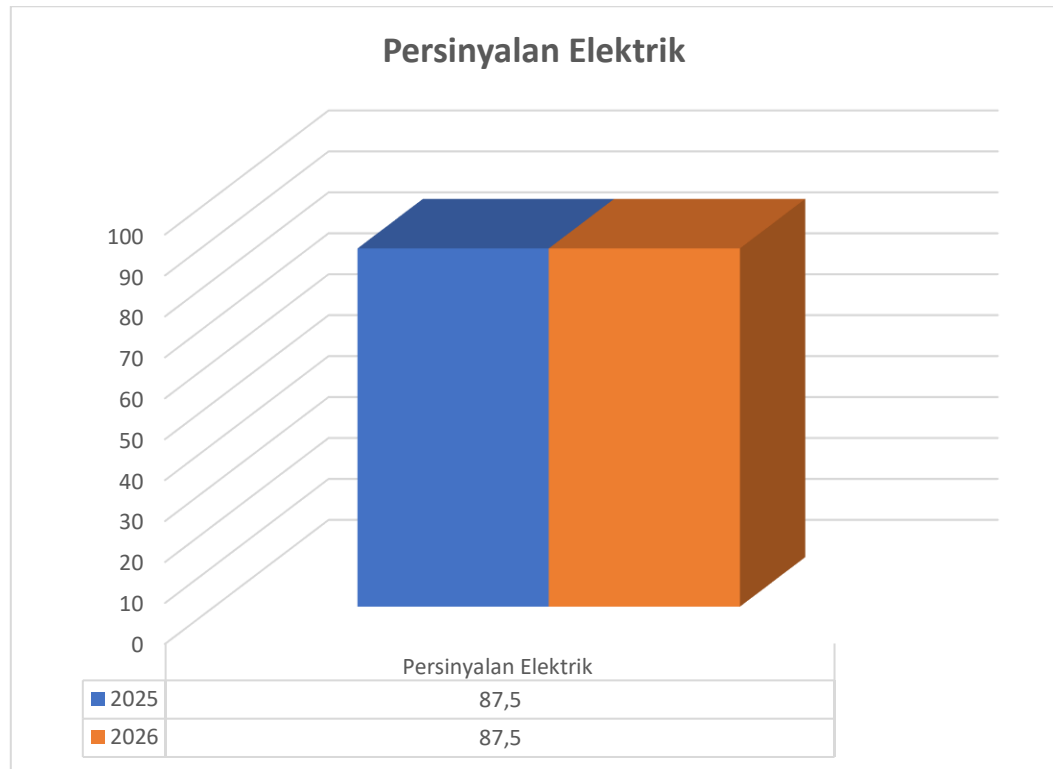
Target Kondisi Jalur KA TQI Kategori I dan II pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,16 menjadi 99,15 dari 2025 sebesar 98,99 dengan kegiatan pendukung antara lain :

- Penggantian Bangunan Jembatan BH 1109 Km.303+680 dan BH 1164 Km.314+769 Lintas Cirebon – Kroya
- Penggantian Jembatan Pada BH 46 Km 21+918 dan BH 59 Km 27+920 Antara Brumbung – Gubug
- Pemantauan dan Evaluasi Prasarana Perkeretaapian



3. Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal (persentase)

Berikut merupakan Target Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal BTP Kelas I Semarang pada Tahun 2026 :



Gambar III. 3 Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal

Target Jalur KA menggunakan persinyalan Elektrik pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang pada Tahun 2026 masih sama dengan target 2025 yaitu 0,750 dengan kegiatan pendukung yaitu Pembangunan Gardu Listrik Delanggu



4. Pemenuhan Target Angkutan KA (persentase)

Berikut merupakan Target Pemenuhan Target Angkutan KA BTP Kelas I Semarang Tahun 2025 - 2029:



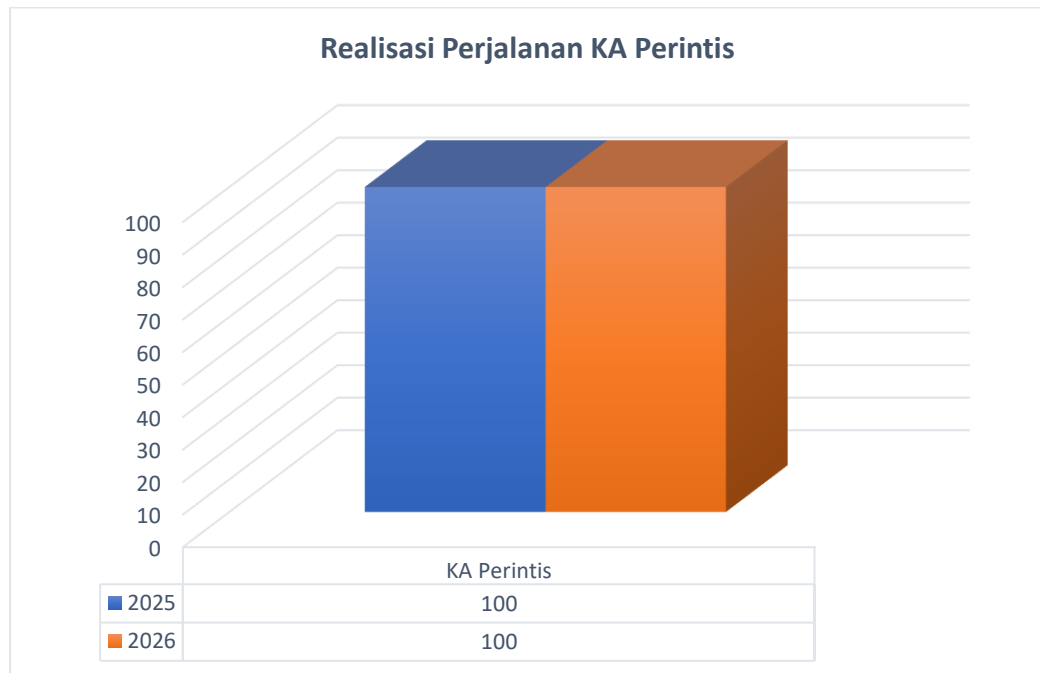
Gambar III. 4 Pemenuhan Target Angkutan KA

Target Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang mengalami kenaikan sebesar 20,712 menjadi 39.052 dari 2025 sebesar 18,34. Kenaikan target tersebut didukung oleh minat masyarakat menggunakan moda transportasi KA yang lebih efisien dan efektif dari berbagai aspek termasuk waktu dan biaya. Kegiatan pendukungnya yaitu Pemantauan dan Evaluasi Lalu Lintas dan Angkutan KA.



5. Realisasi Perjalanan KA Perintis (persentase)

Berikut merupakan target Realisasi Perjalanan KA Perintis BTP Kelas I Semarang 2026 :



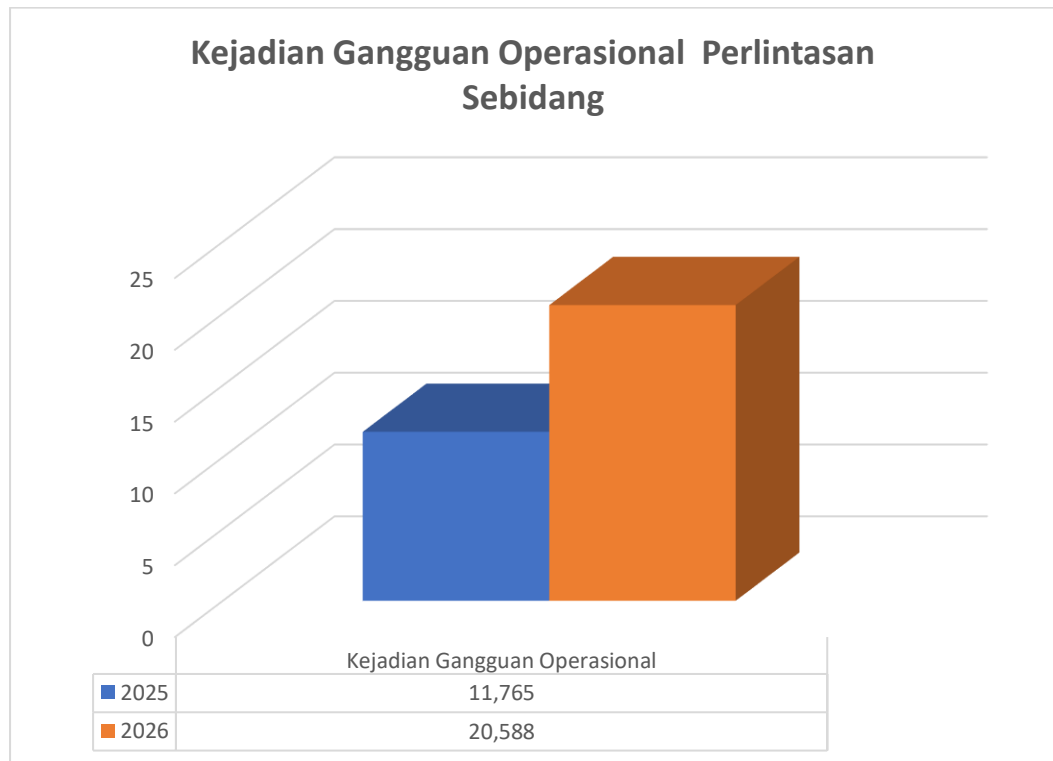
Gambar III. 5 Realisasi Perjalanan KA Perintis

Target persentase Realisasi Perjalanan KA Perintis pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang masih sama dengan tahun 2025 Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis mencapai 100%. Kegiatan yang mendukung indikator kinerja tersebut yaitu Penyelenggaraan perjalanan KA Perintis lintas Solo-Wonogiri.



6. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang

Berikut merupakan Target Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang BTP Kelas I Semarang Tahun 2025 - 2029:



Gambar III. 6 Penurunan Kejadian Gangguan Operasional

Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang BTP Kelas I Semarang Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 8,823 menjadi 20,588 dari 2025 sebesar 11,765. Kegiatan yang mendukung indikator keselamatan ini antara lain:

Kegiatan yang mendukung indikator keselamatan ini antara lain:

- a. Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian;
- b. Pemantauan dan Evaluasi Sarana Perkeretaapian.



7. Tingkat Keselamatan Perjalanan KA (persentase)

Berikut merupakan Target Tingkat Keselamatan Perjalanan KA BTP Kelas I Semarang 2026



Gambar III. 7 Tingkat Keselamatan Perjalanan KA

Target persentase Tingkat Keselamatan Perjalanan KA pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang Tahun 2025 dan 2026 sama sebesar 100%.

Kegiatan yang mendukung indikator keselamatan ini antara lain:

- a. Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) - Uji Riksa dan Jasa Konsul IMO
- b. Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) - 4642.RDA.001
- c. Penanganan Rintang Jalan Pada Jalur KA Antara Mluwang - Cipari, Kawunganten - Lebeng, dan Sikampuh Kroya Segmen Banjar - Kroya Lintas Bogor - Yogyakarta



III. 2 PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN 2025-2029

Indikator Agenda Pembangunan ke-5 Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran pembangunan 5 tahunan yang tertuang dalam RPJP Nasional 2005-2029 yang juga disebut RPJMN 2025-2029. 5 (lima) Sasaran Utama Pembangunan Nasional antara lain:

1. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Jaringan Perkeretaapian
2. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Prasarana Perkeretaapian
3. Peningkatan Keselamatan dan Keandalan Operasi Kereta Api
4. Penguatan Peran Kereta Api sebagai Tulang Punggung Transportasi Massal dan Logistik
5. Pembangunan Prasarana Perkeretaapian yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Kegiatan yang tertuang dalam Renstra BTP Kelas I Semarang bidang perkeretaapian yang mendukung agenda pembangunan dimaksud diantaranya:

1. Pembangunan Gardu Listrik Delanggu;
2. Peningkatan Jembatan KA;
3. Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis;
4. Penanganan Rintang Jalan Pada Jalur KA.



Berikut capaian kinerja pada Agenda Pembangunan ke-5 pada BTP Kelas I Semarang:

Tabel III. 1 Capaian Kinerja Agenda Pembangunan ke-5

No	Lokasi	Kondisi	Progres
1	Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo - Semarang Tahap I Segmen Solo Balapan – Kalioso	<p>a. Kondisi semula</p>  <p>b. Menjadi</p> 	Selesai 100 %
2	Penanganan Rintang Jalan KM 299+900 Antara Prupuk - Linggapura Lintas Cirebon – Kroya	<p>a. Kondisi Semula</p>  <p>b. Menjadi</p> 	Selesai 100 %



BAB IV

RENCANA KINERJA TAHUNAN

IV. 1 SASARAN PROGRAM, INDIKATOR KINERJA DAN POK 2026

		
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KERJA	POK 2026

Penjabaran Rencana Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang Tahun 2026 disusun sesuai dengan konsep Rencana Strategis Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang 2025-2029. Berikut merupakan sasaran program dan indikator kinerja 2026 pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang:



Tabel IV.1 Sasaran Program, Indikator Kerja, POK Awal Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)
SKT1. Meningkatnya Konektivitas dan Integrasi Prasarana di Wilayah BTP	IKK T1. Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	1	- Infrastruktur Perkeretaapian (Pengadaan. Penertiban Lahan) – 4641.CBA.008	1.000.000.000
SKT2. Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta api di Wilayah BTP	IKK T2. Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian (%)	1	- Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Purwosari – Wonogiri- 4641.QAH.009 - Penggantian Bangunan Jembatan BH 1109 Km.303+680 dan BH 1164 Km.314+769 Lintas Cirebon-Kroya – 4641.RBA.088 - Penggantian Jembatan Pada BH 46 Km 21+918 dan dan BH 59 Km 27+920 antara Brumbung-Gubug – 4641.RBA.089 - Pemantauan dan Evaluasi Prasarana Perkeretaapian 4601.EBD.953.061	12.913.043.000 75.893.315.000 143.662.908.000 2.340.338.000
	IKK T3 Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian (%)	1	- Pembangunan Gardu Listrik Delanggu– 4641.RBA.025	40.000.000.000
SK T3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	IKK T4. Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai	1	- Pemantauan dan Evaluasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api - 4601.EBD.953.053	1.132.476.000



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)
Kereta Api di Wilayah BTP	Teknik Perkeretaapian (%)			
	IKK T5. Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian (%)	1	- Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis Lintas Purwosari – Wonogiri -4641.QAH.009	12.913.043.000
	IKK T6. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	1	- Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Kereta Api 4601.EBD.953.067 - Layanan Sarana Internal- 4601.EBB.951	1.651.167.000 286.000.000
SK T4.1. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah BTP	IKK T7. Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian (%)	1	- Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) – Uji Riksa dan Jasa Konsul IMO – 4642.CDA.001 - Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) – 4642.RDA.001 - Penanganan Rintang Jalan Pada Jalur KA Antara Mluwung - Cipari, Kawunganten - Lebeng, dan Sikampung - Kroya Segmen Banjar - Kroya Lintas Bogor – Yogyakarta– 4642.RDA.007	652.555.032.000 8.097.175.000 109.876.487.000
SK T5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan BTP	IKK T8. Nilai AKIP BTP	1	- Layanan Hukum- 4601.EBA.957 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan Kinerja Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Balai 4601.EBD.953.052.A	828.380.000 380.568.000 210.000.000 270.000.000



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4602.CAN.001 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal – 4600.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal – 4601.EBA.960 - Layanan Perkantoran– 4601.EBA.994 	4.670.000.000 4.397.327.000 42.089.074.000
	IKK T9. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian (Nilai)	1	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan pemantauan dan Evaluasi pelaporan kinerja Penyusunan SPIP dan Manajemen Risiko Balai 4601.EBD.953.052.B. 	80.000.000
	IKK T10. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran BTP	1	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Pengelola Keuangan – 4601.EBD.955.051 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - 4601.EBD.952 - Layanan Prasarana Internal –4601.EBB.971 	1.177.067.000 321.103.000 5.430.000.000
	IKK T11. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Wilayah BTP	1	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Penyusunan Laporan Keuangan (SIMAK BMN) – 4601.EBD.955.052 	76.437.000
	IKK T12. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BTP	1	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Reformasi Kinerja 4601.EBD.961 	981.639.000



Keterangan

1	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp.	1.043.997.960.000
	a. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp.	273.469.266.000
	b. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp.	770.528.694.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp.	66.648.714.000
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp.	4.670.000.000
	b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp.	61.708.714.000
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	270.000.000
	JUMLAH	Rp.	1.110.646.674.000



IV. 2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKK) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2026 masih mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 68 tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Terdapat 5 (Lima) sasaran dan 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan yang ingin dicapai melalui Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian:

Tabel IV. 2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026
1	SKT1. Meningkatnya Konektivitas prasarana di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	IKK T1. Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Rasio	0,75
2	SKT2. Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	IKK T2. Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	%	99
		IKK T3. Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	%	87,5



3	SK T3. Meningkatnya KINERJA PELAYANAN lalu lintas dan angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	IKK T4. Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	%	39,05 2
		IKK T5. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	20,58 8
4	SK T4. Meningkatnya Keselamatan transportasi kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	IKK T6. Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	%	100
5	SK T5. Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	IKK T7. Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	%	82,15
		IKK T8. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	LEVE L	15
		IKK T9. Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	NILAI	81





		IKK T10. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	%	100
		IKK T11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	NILAI	74,04





BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang tahun 2026 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi perhubungan dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh *stakeholder* di bidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang tahun 2026 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan bidang perkeretaapian yang dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang tahun 2026 semata-mata disusun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025-2029. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan perubahan kebijakan yang terkait dengan *New Initiatives* maka Rencana Kinerja Tahunan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang tersebut masih perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Review terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 - 2029.